

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial. Ini dikarenakan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi dasar yang kuat dalam pembangunan ekonomi selanjutnya.

Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah mungkin dapat ditampung pada ruang-ruang yang berupa sarana perekonomian, seperti kawasan, perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, sebagai contoh seperti jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dan sanitasi, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan

intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono, 2006).

Menurut Catanesey, Anthony J., dan Jamse C.S (1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungannya yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya.

Sebagai propinsi yang sedang berkembang, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Bali sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Bali dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya. Terlebih Bali sangat terkenal disektor Pariwisata, yang sangat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Karena itu kelayakan infrastruktur menjadi salah satu poin penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah Bali.

Infrastruktur ini berfungsi untuk pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan infrastruktur lebih disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharannya. Mengingat infrastruktur

merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi perkembangan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan. Maka infrastruktur ini harus dikenali dalam kaitan dengan kegiatan dan fungsi sosial dan ekonomi wilayah yang didukung dan dipelopornya. Misalnya kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan (infrastruktur), serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya. Melihat pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman ini, maka keberadaannya ini harus benar-benar tepat guna, artinya tepat tempatnya dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut ialah:

1. Pendanaan

Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan

infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai dari siapa yang merencanakan, Melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan Infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi Fisik Lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistim perencanaan, topografi yang datar akan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata lingkungan dan struktur tanah.

6. Bencana Alam

Faktor bencana alam sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat bencana maka harus memperhatikan konfigurasinya (bentuk, ukuran, ketinggian, dan orientasinya), intensitas dan frekuensi ancaman bencana di suatu wilayah, standar-standar rancangan struktural dan non struktural, pilihan bahan/material inti dan pendukung serta kualitas konstruksinya.

7. Peran serta Masyarakat

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan material yang diperlukan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Propinsi Bali.

1.3 Tujuan

Menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di propinsi Bali serta memberikan informasi biaya yang dibutuhkan.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi : Pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan (provinsi dan kabupaten), air minum, telekomunikasi, limbah (air, sampah, industri), obyek wisata, sekolah atau universitas, dan energi di Bali.

1.5 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur di Provinsi Bali Berdasarkan penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kelayakan infrastrukturnya.
2. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
3. Sebagai tolak ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.